BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO

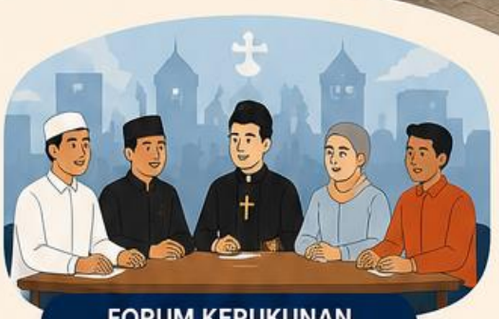
TAHUN 2027







PENDIDIKAN POLITIK



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)



PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN



FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Wonosobo

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen operasional tahunan yang menjabarkan rencana jangka menengah kedalam tindakan nyata yang terukur, dengan merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025–2029.

Nilai strategis Renja Perangkat Daerah terletak pada perannya sebagai jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran tahunan. Dokumen ini menjamin konsistensi antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dibiayai, sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Melalui Renja, program dan kegiatan Bakesbangpol, seperti penguatan moderasi beragama dan kewaspadaan dini, dikonversikan menjadi alokasi sumber daya yang nyata untuk mendukung **Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Wonosobo, yaitu "Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman"**.

Dokumen ini merupakan Renja Bakesbangpol Tahun 2027, yang merupakan hasil penyempurnaan dari rancangan awal. Berdasarkan amanat Pasal 138 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan rencana kerja ini disusun dengan memedomani Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

Langkah penyempurnaan ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, serta subkegiatan, sekaligus melakukan penyesuaian dari pagu indikatif menjadi pagu definitif. Hal ini memastikan bahwa seluruh rencana kerja yang diusulkan telah selaras dengan prioritas daerah dan kapasitas fiskal yang ditetapkan dalam RKPD, sehingga siap diimplementasikan secara akuntabel dan transparan melalui sistem SIPD-RI.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 adalah untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal Renja agar sepenuhnya selaras dengan program, kegiatan, dan pagu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Proses ini bertujuan untuk mempertajam indikator kinerja serta melakukan transformasi pagu indikatif menjadi pagu definitif.

Adapun tujuan ditetapkannya dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 adalah:

1. Menghasilkan dokumen rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang definitif, terukur, dan terpadu sebagai panduan operasional dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Menjadi dasar utama (rujukan) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
3. Menjamin konsistensi dan sinergi perencanaan antara rencana jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025–2029 dengan pelaksanaan pembangunan tahunan di daerah.
4. Menetapkan target kinerja yang akuntabel melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Penyusunan Renja 2027 ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, yaitu:

- Visi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025–2029: “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur”.
- Visi RPJPD Kabupaten Wonosobo 2025–2045: “Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memegang peran sentral dalam mendukung visi tersebut melalui implementasi Misi ke-3, yaitu “Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman”. Pada tahun 2027, misi ini difokuskan pada tahap pembangunan “Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata” dengan arah kebijakan tahunan “Peningkatan

Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Demokratis". Hal ini dimaksudkan untuk menjamin stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi percepatan transformasi ekonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disusun secara sistematis guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana pembangunan tahunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan pedoman dalam Lampiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, sistematika penulisan dokumen ini terdiri atas 6 (enam) bab sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN** Bagian ini menguraikan latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum yang relevan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.
- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU** Bab

  ini menyajikan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 (n-2) dan realisasi Renstra periode berjalan. Fokus utamanya adalah menganalisis realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, kinerja pelayanan substantif, serta mengidentifikasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** Memuat penelaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional tahun 2027, rumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta sinkronisasi strategi dan arah kebijakan dalam mendukung prioritas

  daerah "Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Demokratis".
- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** Menyajikan uraian ringkas dan garis besar rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk tahun 2027. Bagian ini menjelaskan faktor penentu perumusan kegiatan serta merinci alokasi pagu definitif menurut sumber pendanaannya dalam bentuk tabel hasil olahan aplikasi SIPD-RI.

- **BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** Menguraikan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan perangkat daerah, termasuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kerukunan

Umat Beragama (IKUB) sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan.

- **BAB VI PENUTUP** Berisikan uraian penutup yang memuat catatan penting pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan dokumen Renja, serta rencana tindak lanjut untuk penyusunan RKA-PD dan APBD Tahun Anggaran 2027.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025)

Evaluasi capaian kinerja merupakan kajian komprehensif terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 (n-2) yang menjadi tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2025-2029. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja 2025 terhadap realisasi aktual berdasarkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan.

Secara umum, kinerja pelayanan substantif Bakesbangpol pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penurunan Konflik Sosial mencapai 100%, yang menandakan efektifitas sistem deteksi dini dan koordinasi kewaspadaan di masyarakat. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap layanan urusan pemerintahan umum sangat tinggi, tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai nilai 96,49 dari target 91 (capaian 106,03%).

Namun demikian, pada aspek akuntabilitas kinerja internal, Nilai SAKIP Bakesbangpol pada tahun 2025 terealisasi sebesar 68,15 (predikat B) dari target yang ditetapkan sebesar 73 (capaian 93,36%). Penurunan ini menjadi catatan penting untuk dilakukan perbaikan manajemen kinerja pada tahun rencana 2027, khususnya dalam penjenjangan kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi internal.

Berikut adalah rekapitulasi evaluasi capaian kinerja program dan indikator strategis tahun 2025 yang disajikan dalam format Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Wonosobo

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**									
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	10%	30.28	10%	-85.24	−8.524	N/A	N/A	N/A
8.01.03 .2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**									
		Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Mengikuti Pendidikan	10	84.54	10	59.75	5,975	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Wawasan Kebangsaan								
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8.01.04	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**									
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100	78.30	100	81.56	0,8156	79,50	82.21	82,21%
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**									
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	Jumlah Orang yang Mengikuti								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
8.01.05	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase penurunan konflik SARA	50	100.00	50	100.00		N/A	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian kasus/kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	100	100	100	100		100	100	100
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**									
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di	Jumlah Orang yang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial									
		Persentase kasus/kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**									
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Wonosobo

Drs. Agus Kristiono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912251994031006

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo tidak menyelenggarakan maupun melakukan perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM), karena urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya bukan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, penerapan SPM hanya diwajibkan bagi perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, serta sosial.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfokus pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang mencakup pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pendidikan politik, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan dini, penanganan konflik sosial, serta penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ruang lingkup tugas tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum dan tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan SPM.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menggunakan indikator maupun mekanisme pelaporan SPM. Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator sasaran dan program dalam Rencana Strategis (Renstra), serta pelaporan capaian kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan dokumen perencanaan serta penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, tinjauan terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, serta dinamika lingkungan strategis saat ini, dirumuskan permasalahan dan isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2027 sebagai berikut:

1.1. **Rumusan Permasalahan.** Permasalahan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik mencakup aspek pelayanan substantif (Urusan Pemerintahan Umum) dan tata kelola internal organisasi, yaitu:

1. **Optimalisasi Harmonisasi Keberagaman.** Penguatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang masih berada pada *baseline* sebesar 83,39, sehingga kualitas kerukunan dan toleransi antarumat beragama masih perlu terus ditingkatkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama beserta pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat dialog lintas agama, edukasi nilai-nilai toleransi, serta deteksi dini terhadap potensi gesekan sosial di masyarakat.
2. **Belum Optimalnya Partisipasi Politik dan Rendahnya Literasi Politik:** Tingkat literasi politik masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, demokrasi, dan tanggung jawab masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini penting mendapat perhatian untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah dinamika politik lokal yang terus berkembang. Rendahnya literasi politik berimplikasi pada belum optimalnya partisipasi masyarakat yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses politik maupun pengambilan keputusan publik.
3. **Tantangan Stabilitas Keamanan Daerah.** Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonosobo masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan upaya antisipatif. Potensi kerawanan berupa konflik sosial, penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks), ujaran kebencian, intoleransi, serta gesekan antar kelompok masyarakat dapat muncul sebagai dampak dari dinamika sosial, politik, maupun tekanan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, meningkatnya penggunaan media digital juga berpotensi mempercepat penyebaran informasi provokatif yang dapat memengaruhi kondusivitas daerah apabila tidak diimbangi dengan penguatan deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
4. **Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.** Organisasi kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Namun demikian, keterlibatan Ormas dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu dioptimalkan. Hal ini ditunjukkan oleh belum meratanya partisipasi Ormas dalam kegiatan pencegahan potensi konflik, edukasi wawasan kebangsaan, penguatan toleransi, serta deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, pemberdayaan, koordinasi, dan kemitraan dengan Ormas agar mampu berperan aktif sebagai agen pemersatu, pelopor kerukunan, serta mitra pemerintah dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif guna mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

5. **Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.** Penguatan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, serta semangat persatuan dan kesatuan masih menjadi isu strategis yang perlu terus dioptimalkan. Perkembangan teknologi informasi dan media digital yang semakin pesat telah meningkatkan arus informasi yang tidak seluruhnya sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila, memperkuat semangat kebhinekaan, dan membangun karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan sebagai fondasi dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan ketahanan daerah.

1.2. Isu Strategis Tahun 2027 Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah pada tahun rencana 2027:

1. Stabilitas sebagai Prasyarat Transformasi Ekonomi: Sejalan dengan tema pembangunan 2027 yaitu “Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan”, Bakesbangpol memikul isu krusial untuk menjamin stabilitas politik dan keamanan wilayah agar iklim investasi dan transformasi ekonomi daerah berjalan kondusif.
2. Penguatan Moderasi Beragama dan Karakter Bangsa. Penguatan

moderasi beragama dan karakter bangsa menjadi isu strategis dalam mendukung peningkatan Nilai Dimensi Sosial sebagai bagian dari Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) yang ditargetkan mencapai 6,84 pada Tahun 2027. Perkembangan teknologi informasi dan media digital yang semakin pesat berpotensi memengaruhi pola pikir, sikap, dan interaksi masyarakat, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, saling menghormati, serta semangat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan moderasi beragama, dialog lintas agama, serta edukasi bagi generasi muda guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkarakter Pancasila.

3. Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan: Mendorong peran aktif Ormas sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban daerah, dengan target partisipasi ormas sebesar 83% pada tahun 2027.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penjaringan hingga tahap penyusunan Renja Tahun 2027, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan (kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah kabupaten/kota) yang disampaikan secara langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo di luar mekanisme Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

2.5 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat yang dirumuskan berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bertujuan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program dan kegiatan perangkat daerah agar tercipta sinkronisasi pembangunan yang tepat sasaran dan transparan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap usulan RKPD Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengintegrasikan 7 (tujuh) usulan pokok-pokok pikiran DPRD dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 670.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Seluruh usulan tersebut telah diverifikasi dan diselaraskan ke dalam program kerja

Bakesbangpol Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Pendidikan Wawasan Kebangsaan: Diakomodasi melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Usulan ini tersebar di berbagai wilayah seperti Kecamatan Kertek, Sapuran, Kalikajar, Leksono, dan Kepil untuk menjawab isu memudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda.
2. Pendidikan Politik: Diakomodasi melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik. Usulan ini difokuskan di wilayah Kecamatan Mojotengah, Garung, dan Kejajar guna meningkatkan literasi politik dan partisipasi pemilih.

Rekapitulasi usulan Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2027 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Rekomendasi SKPD	Alokasi Anggaran 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Forum Kerukunan Ummat Beragama Desa Kapencar, perlu penguatan kapasitas	Warga Desa Kapencar Kec. Kertek, Kab. Wonosobo	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan di Kecamatan Kertek	35.000.000
2	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Maysarakat di Kecamatan Sapuran membutuhkan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk memperkuat pemahaman nilai kebangsaan dan meningkatkan kepedulian serta partisipasi sosial	Kecamatan Sapuran, Kab. Wonosobo	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan di Kecamatan Sapuran	100.000.000
3	Pendidikan Politik	Rendahnya partisipasi, kurangnya pemahaman politik, maraknya hoaks, dan sikap apatis masyarakat	Kabupaten Wonosobo, Kab. Wonosobo	Pendidikan politik dapat dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Mojotengah, Garung dan Kejajar	110.000.000
4	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Pengetahuan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat masih kurang	Kabupaten Wonosobo, Kab. Wonosobo	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar	125.000.000
5	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Memudarnya Nasionalisme dikalangan generasi muda dan semakin genjarnya pangaruh opini di Media Sosial yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat di Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar, Kab. Wonosobo	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan di Kecamatan Kalikajar	75.000.000
6	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Memudarnya Nasionalisme dikalangan generasi muda dan semakin genjarnya pangaruh opini di Media Sosial yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan dikalangan	Kecamatan Leksono, Kab. Wonosobo	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan di Kecamatan Watumalang, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Leksono	150.000.000

No	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Rekomendasi SKPD	Alokasi Anggaran 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		masyarakat di Kecamatan Watumalang, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Leksono			
7	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Masih minimnya perhatian pemuda bagi warga Kecamatan Kepil dan Kecamatan Sapuran atas rasa cinta terhadap Tanah Air	Kecamatan Kepil, Kab. Wonosobo	Pendidikan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan di Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepi	75.000.000
TOTAL ANGGARAN					**670.000.000**

2.6 Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan Renja Perangkat Daerah

Sub-bab ini menyajikan hasil kajian dan perbandingan sistematis antara dokumen Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 dengan dokumen Renja yang telah diselaraskan dengan Peraturan Bupati (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Proses Perbandingan dilakukan melalui mekanisme telaah sinkronisasi antara usulan program dan kegiatan yang disusun secara teknokratik pada tahap awal dengan hasil analisis kebutuhan serta kemampuan fiskal daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027. Tahapan ini melibatkan verifikasi indikator kinerja, lokasi, serta kelompok sasaran guna menjamin kepastian operasional anggaran di dalam sistem SIPD-RI.

Alasan dilakukannya Perbandingan Berdasarkan amanat Pasal 138 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perbandingan ini dilakukan untuk melakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan tahunan. Hal ini bertujuan untuk:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan (Renja) dengan kebijakan anggaran daerah (RKPD)
2. Melakukan transformasi nilai pagu indikatif menjadi pagu definitif yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-PD
3. Mengintegrasikan perubahan kebijakan nasional terbaru serta hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disepakati.

Temuan dan catatan penting berdasarkan hasil reviu terhadap renja ini, terdapat beberapa catatan strategis dibandingkan dengan rancangan awal, antara lain:

1. Penyesuaian Pagu: Terdapat perubahan besaran pagu anggaran dari indikatif ke definitif pada beberapa program penunjang dan program substantif mengikuti penyesuaian belanja pegawai serta alokasi mandatori (*mandatory spending*).
2. Terdapat penambahan rumusan kegiatan dan sub kegiatan baru yang belum tercantum pada rancangan awal.
3. Integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD: Terdapat 7 (tujuh) usulan pokok-pokok pikiran DPRD dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 670.000.000. Usulan ini difokuskan pada kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (seperti di Desa Kapencar, Kec. Sapuran, dan Kalikajar) serta Pendidikan Politik (Wilayah Mojotengah, Garung, dan Kejajar) untuk meningkatkan literasi politik dan nasionalisme masyarakat.

4. Penajaman Program Prioritas Tahun 2027: Renja memasukkan usulan Kegiatan Prioritas sebesar Rp225.000.000. Kegiatan ini mencakup Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Remaja, Pemuda, dan Santri (Rp 200 juta) serta Fasilitasi MLKI (Rp 25 juta). Hal ini dilakukan untuk menjamin stabilitas keamanan sebagai prasyarat transformasi ekonomi daerah.

Secara rinci, perbandingan antara Rancangan Awal dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Perbandingan Rancangan Awal dan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten: Wonosobo Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun: 2027

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				870.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.363.550.000,00	493.550.000,00.	Bertambah
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				870.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.363.550.000,00	493.550.000,00.	Bertambah
8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran		870.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran		1.363.550.000,00	493.550.000,00.	Bertambah

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Definitif (Rp)**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.000.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.795.052.000,00	795.052.000,00	Bertambah
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.000.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.795.052.000,00	795.052.000,00	Bertambah
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan		1.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan		1.795.052.000,00	795.052.000,00	Bertambah

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Definitif (Rp)**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN				1.732.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN				384.329.012,00	−1.347.670.988,00	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				1.732.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				384.329.012,00	−1.347.670.988,00	Berkurang
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1.732.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		384.329.012,00	−1.347.670.988,00	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				421.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				77.000.000,00	−344.000.000,00	Berkurang
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				421.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				77.000.000,00	−344.000.000,00	Berkurang
8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksanya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercay		421.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Terlaksanya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercay		77.000.000,00	−344.000.000,00	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			aan di Daerah					aan di Daerah				
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				420.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				441.060.494,00	-21.060.494,00	Berkurang
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				420.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				441.060.494,00	-21.060.494,00	Berkurang
8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing		117.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing		80.000.000,00	-37.000.000,00	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan		102.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan		120.110.494,00	18.110.494,00	Bertambah

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		201.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		240.950.000,00	39.950.000,00	Bertambah

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.057.346.065,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.977.744.065,00	-79.602.000,00	Berkurang
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00	-7.000.000,00	Berkurang
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		500.000,00	-3.500.000,00	Berkurang
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500.000,00	-3.500.000,00	Berkurang
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.637.236.065,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.583.416.065,00	-9.029.928,00	Berkurang
8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.583.416.065,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.583.416.065,00	0	
8 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian		53.820.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-		0	-53.820.000,00	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			/Verifikasi Keuangan SKPD									
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				138.610.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				116.150.000,00	-22.460.000,00	Berkurang
8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				-	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.978.750,00	2.978.750,00	Bertambah
8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		17.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.608.400,00	-10.391.600,00	Berkurang
8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang		6.828.525,00	6.828.525,00	Bertambah

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								Disediakan				
8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6.500.000,00	0	Tetap
8 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4.000.000,00	0	Tetap
8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		111.110.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		89.234.325,00	-21.875.675,00	Berkurang
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.000.000,00	-1.500.000,00.	Berkurang

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10.000.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10.000.000,00		Tetap
8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7.000.000,00	-1.500.000,00	Berkurang
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.378.000,00	4.378.000,00	Bertambah
8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00	0	Tetap
8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		21.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		23.050.000,00	2.050.000,00	Bertambah

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Definitif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		152.328.000,00	2.328.000,00	Bertambah
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.800.000,00	800.000,00	Bertambah
01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		43.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		44.300.000,00	800.000,00	Bertambah
8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7.500.000,00	0	Tetap

No	RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)					RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan/ Perkada RKPD – Pagu Definitif)					Selisih Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan (Bertambah/ Berkurang/ Tetap)
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Definitif (Rp)**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30.000.000,00	0	Tetap
					7.500.346.065,00					**7.038.735.571,00**		**-461.610.494,00**

2.7 Inovasi Bidang Urusan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah penyediaan informasi layanan secara daring melalui situs web resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Melalui situs web tersebut, masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan (Ormas), dapat mengakses secara mandiri persyaratan, alur pelayanan, serta mengunduh formulir permohonan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi layanan tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mempercepat proses persiapan administrasi, serta mendukung penerapan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disusun dengan sepenuhnya merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi perencanaan tahunan dengan target jangka menengah daerah yang mendukung Misi ke-3 RPJMD, yaitu “Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman”.

Penentuan target kinerja tahun 2027 didasarkan pada evaluasi capaian tahun 2025 serta penajaman prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi 2025, secara umum kinerja substantif menunjukkan hasil positif, namun aspek akuntabilitas kinerja (SAKIP) memerlukan perbaikan signifikan karena realisasinya (68,15) masih di bawah target (73,00). Oleh karena itu, target tahun 2027 difokuskan untuk mengembalikan performa tata kelola internal sekaligus meningkatkan harmonisasi sosial.

Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja disajikan dalam format Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten : Wonosobo Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2026)	Target Tahun Rencana (2027)	Target Tahun (2028)	Target Tahun (2029)	Kondisi Akhir (Akhir Renstra 2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TPD.3.2.1.1. Meningkatkan Harmonisasi Keberagaman		Indeks Harmoni Indonesia	6.73	6,85	6,97	7,05	7,05
		SPD.3.2.2.1.1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	85,25	84,78	85,10	85,85	85,85
		SPD.3.2.2.1.2. Meningkatnya Pembinaan Sosial	Nilai Dimensi Sosial	6.74	6,84	6,86	6,88	6,88
		SPD.3.2.2.1.3. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	44.00	43,00	45,00	48,00	48,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68.15	73,00	77,00	80,00	80,00
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	98.03	98,18	98,58	98,98	98,98

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi organisasi. Penentuan arah kebijakan ini telah diselaraskan dengan tahapan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

Pada dokumen renja ini, arah kebijakan dipastikan telah konsisten dengan Perkada tentang RKPD Tahun 2027 yang mengusung tema "Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata Berkelanjutan". Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memegang peran krusial dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan transformasi ekonomi di Kabupaten Wonosobo.

Tahun 2027 merupakan Tahap II dari Renstra 2025–2029, di mana arah kebijakan tahunan difokuskan pada: "Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Demokratis".

Fokus kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi utama sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas sistem deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial.
2. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah, TNI/Polri, dan masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah.
3. Optimalisasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan sosial budaya melalui kegiatan prioritas seperti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Remaja, Pemuda, dan Santri
4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat yang sehat, rasional, dan beretika menghadapi dinamika politik tahun 2027.
5. Peningkatan pengawasandan pembinaan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga politik sebagai mitra pemerintah daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut disajikan dalam format Tabel 3.2 Sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kabupaten: Wonosobo Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi : Wonosobo, Sejahtera, Adil dan Makmur

Misi : Eratkan Persatuan Untuk Penguatan Harmonisasi Keberagaman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Harmonisasi Keberagaman	1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama 2. Meningkatnya Pembinaan Sosial 3. Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Penyelenggaraann Pemerintahan pada Perangkat Daerah	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam system ketertiban dan keamanan; 2. Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan; 3. Peningkatan toleransi keberagaman; 4. Peningkatan peran aktif organisasi masyarakat.	Menguatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim demokrasi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo perlu diselaraskan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Daerah Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya memerlukan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 35 Program Daerah didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Program tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yang menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo melaksanakan program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam penguatan persatuan, kesatuan, dan harmonisasi kehidupan masyarakat. Program delegasi provinsi yang menjadi bagian dari dukungan tersebut meliputi:

1. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
2. Mendorong penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan.

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, serta keselarasan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Perubahan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah, memperkuat harmonisasi kehidupan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025–2029, yaitu “Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman”. Misi ini diwujudkan melalui Program Unggulan Bupati "Sobo Harmoni Asri Lestari" (Implementasi Prinsip Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Pada Layanan Publik). Dan misi ke 8 yaitu “Implementasikan Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel dn Terpercaya” misi ini diwujudkan melalui Program Unggulan Bupati “Praja Nglayani, Ngayomi, Ngayahi”.

Secara teknis, rencana ini merupakan implementasi Tahap II Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang mengusung tema kebijakan tahunan “Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Demokratis”.

Penyusunan renja ini didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta penajaman terhadap isu strategis daerah. Fokus utama di tahun 2027 adalah menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat mutlak bagi suksesnya transformasi ekonomi daerah di sektor pertanian dan pariwisata.

Pada dokumen renja ini, pagu indikatif pada Rancangan Awal telah disempurnakan menjadi pagu definitif. Keseluruhan rancangan ini dijabarkan melalui format yang merupakan pengembangan dari Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rumusan rencana program, pendanaan definitif, dan prakiraan maju tersebut disajikan dalam format Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028

Kabupaten: Wonosobo Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.363.550.000,00			870.000.000,00	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.363.550.000,00			870.000.000,00	
8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Kab. Wonosobo	800 Orang	1.363.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	800	870.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.795.052.000,00			1.738.000.000,00	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.795.052.000,00			1.738.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Wonosobo	500 Orang	1.795.052.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500	1.738.000.000,00	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				384.329.012,00			1.000.000.000,00	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan				384.329.012,00			1.000.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Wonosobo	230 Orang	384.329.012,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200	1.000.000.000,00	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				77.000.000,00			422.000.000,00	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				77.000.000,00			422.000.000,00	
8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	Kab. Wonosobo	500 Orang	77.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500	422.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				(PAD)			
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				441.060.494,00			422.000.000,00	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				441.060.494,0			422.000.000,00	
8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti	Kab. Wonosobo	30 Orang	80.000.000,00	PENDAPATAN	30	118.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				ASLI DAERAH (PAD)			
8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Kab. Wonosobo	24 Laporan	120.110.494,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24	102.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonosobo	12 Dokumen	240.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	202.000.000,00	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.960.744.065,00			3.059.001.065,00	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00			8.000.000,00	
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonosobo	5 Dokumen	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	5	4.000.000,00	
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Wonosobo	3 Laporan	500.000,00	PENDAPATAN	3	4.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perangkat Daerah				ASLI DAERAH (PAD)			
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.583.416.065,00			2.637.236.065,00	
8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonosobo	17 Orang/bulan	2.583.416.065,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18	2.583.416.065,00	
8 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Wonosobo	12 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53.820.000,00	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				116.150.000,00			138.610.000,00	
8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Wonosobo	1 Paket	2.978.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	
8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Wonosobo	6 Paket	6.608.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6	17.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Wonosobo	1 Paket	6.828.525,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	
8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Wonosobo	3 Paket	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	6.500.000,00	
01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Wonosobo	14 Dokumen	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3	4.000.000,00	
8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonosobo	12 Laporan	89.234.325,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	111.110.000,00	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.000.000,00			8.500.000,00	
8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Wonosobo	6 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6	Rp. 0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Wonosobo	4 Unit	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4	8.500.000,00	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.378.000,00			184.000.000,00	
8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonosobo	1 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	3.000.000,00	
8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Wonosobo	4 Laporan	23.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4	21.000.000,00	
8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Wonosobo	12 Laporan	152.328.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	160.000.000,00	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.800.000,00			82.655.000,00	
8 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonosobo	9 Unit	44.300.000,00	PENDAPATAN	9	45.155.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana)	Kebutuhan Dana/ Pagu Definitif (Rp.000) (Tahun Rencana)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja (Prakiraan Maju)	Kebutuhan Dana/Pagu (Rp.000) (Prakiraan Maju)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				ASLI DAERAH (PAD)			
8 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kab. Wonosobo	12 Unit	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	7.500.000,00	
8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Wonosobo	1 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	30.000.000,00	
			Jumlah		**7.038.735.571,00**			**7.511.001.065,00**	

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Khusus

Berdasarkan pedoman penyusunan RKPD tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan rencana kerja dan pendanaan khusus yang diarahkan untuk memberikan daya dukung terhadap program prioritas daerah, menyelaraskan target pembangunan dengan agenda nasional, serta mengarusutamakan isu-isu tematik pembangunan lainnya.

1. Pencapaian Program Prioritas Daerah Pada tahun rencana 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Kegiatan Prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 225.000.000. Fokus pendanaan prioritas ini meliputi:
    - Fasilitasi MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia): Dialokasikan sebesar Rp 25.000.000 guna memperkuat dimensi kesetaraan dan kerjasama dalam keragaman budaya serta kepercayaan.
    - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Remaja, Pemuda, dan Santri: Dialokasikan sebesar Rp 200.000.000 sebagai langkah preventif membentengi generasi muda dari pengaruh ideologi radikal dan intoleransi.
2. Pengarusutamaan Pencegahan Korupsi: Pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD senilai Rp 670.000.000 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi melalui integrasi indikator *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) dalam sistem SIPD-RI untuk mencegah risiko penyimpangan anggaran.

Seluruh rencana kerja tematik dan pendanaan khusus ini telah terintegrasi di dalam rumusan program pada Tabel 4.1 (Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan), dan implementasinya akan dimonitor secara berkala sebagai bagian dari kontribusi dinas terhadap target pembangunan tematik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Berdasarkan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, berikut adalah poin-poin utama mengenai IKU:

1. Fungsi Utama: IKU disusun sebagai acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar utama dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah.
2. Kegunaan Dokumen: IKU berfungsi sebagai landasan bagi perencanaan tahunan, penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja (LKjIP), serta pemantauan dan pengendalian kinerja.

Target IKU Tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029. Adapun target IKU Tahun 2027 sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIDANG URUSAN TAHUN 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra (Tahun berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Harmoni Indonesia	%	6,80	6,73	6,85	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	84,20	86,25	84,78	Laporan Tim Penyusun Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Bappeda Wonosobo dan Indoriset Strategis
3	Nilai Dimensi Sosial	Angka	6,82	6,74	6,84	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI
4	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Angka	42,00	44,00	43,00	Bagian Organisasi
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,00	68.15	73,00	Inspektorat
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	97,83	96.49	98,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, berikut adalah penyajian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo untuk tahun rencana 2027.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan operasional organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang mencakup urusan pemerintahan umum serta tata kelola internal. Penentuan target tahun 2027 ini dilakukan melalui penajaman pasca evaluasi tahun 2025 guna memastikan konsistensi dengan arah kebijakan "Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Iklim Demokratis".

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 berdasarkan target Renstra Tahun 2025–2029, realisasi capaian Tahun 2025, target Tahun 2027, beserta sumber data masing-masing indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra (Tahun berkenaan)	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2027	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial yang Terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Penanganan Konflik SARA yang Terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaran Keamanan dan Ketertiban	%	82,00	N/A	83,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	79,50	81.56	82.50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat	%	100,00	N/A	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	50,00	N/A	50,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Persentase Pendidikan Politik bagi Masyarakat	%	100,00	N/A	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100,00	N/A	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	100,00	70	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	90,50	N/A	91,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral	%	63,00	N/A	65,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterangan: IKK baru sesuai Kepmendagri 100.2.1.7-109 Tahun 2026

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Penyusunan rencana kerja ini merupakan wujud nyata dari upaya sinkronisasi antara perencanaan teknokratik di tingkat internal dengan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Penegasan dalam pelaksanaan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Rancangan: Renja ini merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Awal yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan diselaraskan sepenuhnya dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
2. Rujukan Anggaran: Dokumen Renja yang telah definitif berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

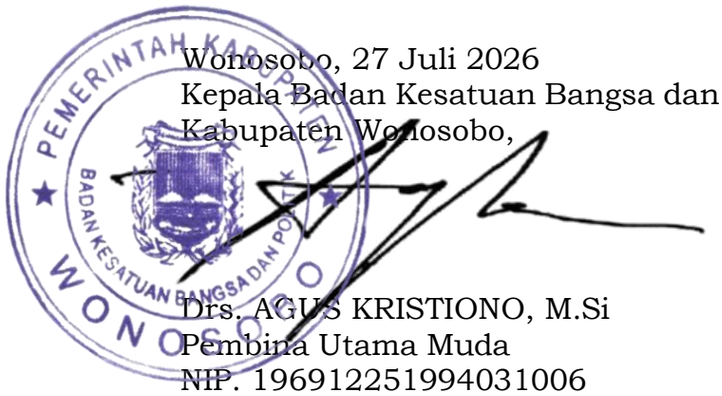
6.2 Catatan Penting dan Tindak Lanjut

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan Renja 2027 perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Konsistensi Perencanaan: Seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran agar setiap program dan sub-kegiatan mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.
2. Manajemen Risiko: Pelaksanaan program substantif, khususnya dalam penanganan potensi konflik sosial dan politik, harus mengedepankan prinsip manajemen risiko guna menjamin stabilitas keamanan wilayah sebagai prasyarat transformasi ekonomi daerah.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mewujudkan Wonosobo yang Sejahtera, Adil, dan Makmur.

Wonosobo, 27 Juli 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Wonosobo,



Drs. AGUS KRISTIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912251994031006

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. WONOSOBO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**7.038.735.571,00**								**7.511.001.065,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**7.038.735.571,00**								**7.511.001.065,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**7.038.735.571,00**								**7.511.001.065,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.977.744.065,00**								**3.059.001.065,00**	
			-	-		-	-	2.977.244.065,00							-	3.051.001.065,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00						-		8.000.000,00	
		-						1.000.000,00						-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	500.000,00							-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	500.000,00							-	4.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.583.416.065,00						-		2.637.236.065,00	
		-						2.583.416.065,00						-		2.637.236.065,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0,00							-	53.820.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.583.416.065,00							-	2.583.416.065,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.583.416.065,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			2.583.416.065,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	2.583.416.065,00	Kab. Wonosobo	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.583.416.065,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			53.820.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	53.820.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						116.150.000,00						-		138.610.000,00	
		-						116.150.000,00						-		138.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00							-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	89.234.325,00							-	111.110.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.500.000,00							-	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.978.750,00							-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.608.400,00							-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.828.525,00							-	0,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.978.750,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.978.750,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.608.400,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	6.608.400,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	17.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.828.525,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	6.828.525,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.500.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			6.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	6.500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	6.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	14 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.234.325,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			111.110.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	89.234.325,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	111.110.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.000.000,00						-		8.500.000,00	
		-						17.000.000,00						-		8.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00							-	8.500.000,00	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			8.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	7.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	8.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178.378.000,00						-		184.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						178.378.000,00						-		184.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	23.050.000,00							-	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	152.328.000,00							-	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.000.000,00							-	3.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.050.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	23.050.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	21.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						152.328.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	152.328.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	160.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81.800.000,00						-		82.655.000,00	
		-						81.800.000,00						-		82.655.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	30.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	44.300.000,00							-	45.155.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	7.500.000,00							-	7.500.000,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.300.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			45.155.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	44.300.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	45.155.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.500.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			7.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	7.500.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	7.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.363.550.000,00**								**870.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.363.550.000,00							-	870.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.363.550.000,00						-		870.000.000,00	
		-						1.363.550.000,00						-		870.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	1.363.550.000,00							-	870.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						1.363.550.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			870.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	800 Orang	1.363.550.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	870.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.795.052.000,00**								**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.795.052.000,00							-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.795.052.000,00						-		1.000.000.000,00	
		-						1.795.052.000,00						-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	1.795.052.000,00							-	1.000.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.795.052.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	500 Orang	1.795.052.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**384.329.012,00**								**1.738.000.000,00**	
			-	-		-	-	384.329.012,00							-	1.738.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						384.329.012,00						-		1.738.000.000,00	
		-						384.329.012,00						-		1.738.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	384.329.012,00							-	1.738.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						384.329.012,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			1.738.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	230 Orang	384.329.012,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.738.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**77.000.000,00**								**422.000.000,00**	
			-	-		-	-	77.000.000,00							-	422.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						77.000.000,00						-		422.000.000,00	
		-						77.000.000,00						-		422.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	77.000.000,00							-	422.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						77.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			422.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	500 Orang	77.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	422.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**441.060.494,00**								**422.000.000,00**	
			-	-		-	-	441.060.494,00							-	422.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						441.060.494,00						-		422.000.000,00	
		-						441.060.494,00						-		422.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	240.950.000,00							-	202.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	120.110.494,00							-	102.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	80.000.000,00							-	118.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						80.000.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			118.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	30 Orang	80.000.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	118.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						120.110.494,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			102.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	24 Laporan	120.110.494,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	102.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						240.950.000,00			-	-	Peningkatan harmonisasi keberagaman			202.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Dokumen	240.950.000,00	Kab. Wonosobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	202.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							**7.038.735.571,00**								**7.511.001.065,00**	